



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-1 Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA

Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II;
2. Para Pejabat Eselon III dan IV;
3. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-7 /Sesmenko/Maritim/IX/2016
TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dan pencegahan atas indikasi terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu dilakukan suatu penanganan pengaduan masyarakat.

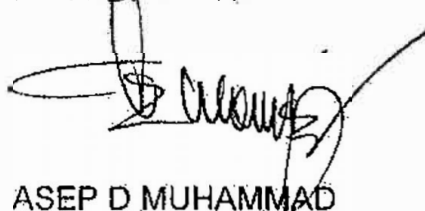
Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat baik yang berupa saran dan kritik maupun pengaduan tentang adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan atau kepada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Pengaduan yang masuk ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan harus ditanggapi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan prinsip cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penanganan pengaduan masyarakat dapat berupa klarifikasi, penerusan informasi kepada instansi terkait, dan lain sebagainya sesuai dengan pokok pengaduan yang ditangani.




Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 28 September 2016

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR



ASEP D MUHAMMAD

No	Jabatan	Paraf
	Kepala Biro Informasi dan Hukum	
2	Inspektur	
3	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman